



28 Proyek jadi

Temuan BPK

PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 28 proyek bermasalah pada empat unit kerja senilai Rp2,54 miliar pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun anggaran 2022. BPK memberikan predikat opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).

Anggota VI BPK RI, Pius Lustri lanang mengatakannya saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD Kalbar dalam sidang paripurna, kemarin.

"Kami (BPK) masih menemu-

kan permasalahan yang harusnya menjadi perhatian berupa 28 paket pekerjaan di 4 SKPD dan tidak sesuai dengan ketentuan. Total nilai pagunya mencapai Rp2,54 miliar," ucap dia.

Pius mengingatkan kepada Gubernur Kalbar agar dalam ku-

run waktu 60 hari kedepan harus ditindak lanjuti terhadap temuan tersebut.

"Mengingatkan, supaya rekomendasi yang diberikan BPK secepatnya ditindaklanjuti Gubernur Kalbar beserta jajaran selambat-lambatnya 60 hari

setelah LHP diserahkan sesuai dengan pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara," ucapnya.

BPK dipastikan mengawal rekomendasi dengan tujuan

secepatnya ditindaklanjuti Gubernur Kalbar.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menjelaskan, temuan tersebut sebagian besar sudah disetor kembali oleh kontraktor.

◆Ke Halaman 15 kolom 1

28 Proyek jadi Temuan BPK

Sambungan dari halaman 9

"Permasalahannya kecil saja karena kurang volume kerja, kontraktor harus dikembalikan. Sebagian besar sudah dikembalikan. Misalnya jalan menggunakan batu 15 centimeter tapi digunakan ukuran 14

centimeter," terangnya.

Sutarmidji menjamin sebelum 60 hari seperti yang dideadline BPK, temuan tersebut sudah dapat terselesaikan Pemprov Kalbar.

Anggota DPRD Kalbar menyarankan Pemprov Kalbar segera menindak-

lanjuti temuan BPK tersebut. "Secepatnya ditindaklanjuti. Jangan dilama-lamaan, meski kecil tetapi uang negara juga," ucap Martinus Sudarno, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar.

Menurutnya, temuan BPK tak besar. Namun har-

usnya dapat menjadi perhatian seluruhnya. Martinus juga percaya Pemprov Kalbar mampu menuntaskannya dengan cara mengembalikannya. Atau memang hanya administrasi dan dapat segera dituntaskan. "Saya pikir selesailah," ujarnya. (den)